

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.
- Ariani, Nevey Varida. 2020. *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2018. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kie, Tan Thong. 2017. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Makarim, Edmon. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya.
- Nawawi Aripin. 2021. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana: Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Loventa, Rizkika Maharani. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Batam: *Jurnal Combines*. Vol. 01, No. 01.
- Novariza. 2021. "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU". Jambi: *Journal Of Criminal*. Volume. 2 Nomor. 3.
- Sari, N. K., & Wibowo, A. 2025. "Analisis Ketidakseragaman Regulasi Korporasi: Momentum Reformasi Hukum 2025". *Jurnal Inovasi Hukum*. 6(3), hlm. 112-128.
- Yunia, L. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas". *Jurnal Magister Kenotariatan*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sumber Internet dan Data Elektronik

- Kemenkumham Jatim. 2023. "Penerapan Kebijakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat". Diakses pada 21 Agustus 2023 dari <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. "Putusan PTTUN Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT". Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. "Putusan PTUN Jakarta Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT (Michael Steven vs. Dewan Komisioner OJK)". Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. "Siaran Pers: OJK Lanjutkan Upaya Hukum Terhadap Pemilik Kresna Group". Diakses pada 2024 dari <https://www.ojk.go.id/>.